

MASA DEPAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA SETELAH ERA REFORMASI

Anggun Muktyastuti
angguntyas1997@gmail.com
Universitas Airlangga

ABSTRAK

Di era reformasi ini, partai politik menghadapi pertanyaan mengenai pelembagaan. Umumnya partai politik menghadapi lemahnya pelembagaan seperti permasalahan ideologi dan platform, kekompakan dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan sistem kaderisasi yang belum kuat. Selain itu, sistem kepartaian yang ada saat ini tidak sesuai dengan sistem presidensial sehingga pemerintahan terpilih tidak bisa efektif.

Kata Kunci: Sistem Kepartaian, Pelembagaan Partai Politik, Dan Electoral Threshold.

PENDAHULUAN

Indonesia pasca Orde Baru mengalami perubahan dalam penerapan sistem politik, dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Dengan diterapkan sistem demokratis memberikan perubahan terhadap dinamika kehidupan politik. Di antara perubahan yang terjadi adalah jaminan kebebasan berekspresi dan berasosiasi untuk mendirikan dan atau membentuk partai politik (parpol). Tidak seperti era sebelumnya, pada masa pasca Orde Baru ini yang disebut sebagai era reformasi, setiap kelompok atau golongan bebas membentuk dan mendirikan parpol serta tidak ada pembatasan jumlah partai politik.

Persoalan yang muncul terkait dengan banyaknya parpol yang dibentuk dan mengikuti pemilu tersebut tidak berbanding lurus dengan fungsi-fungsi yang diembanya. Keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, melakukan pendidikan politik, dan penyelesaian konflik, belum dijalankan dengan maksimal. Berbagai survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey, publik kecewa dan tidak puas terhadap eksistensi parpol. Partai politik yang ada sangat mengecewakan rakyat karena tidak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi sebaliknya memperjuangkan kepentingan partai dan kelompoknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila kita telisik, perkembangan partai politik era reformasi belum menjadi institusi publik yang memiliki tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap pemilihnya. Pada masa Orde Baru, partai politik menjadi “mesin” politik penguasa sehingga partai politik lebih diarahkan pada kepentingan pelanggaran kekuasaan penguasa (status quo). Ketika memasuki era reformasi, partai politik seakan-akan kaget dengan tuntutan masyarakat yang besar namun tidak disertai dengan kelembagaan yang baik. Partai politik dewasa ini belum memperlihatkan akuntabilitas kepada konstituen.

Partai politik pada era reformasi juga terjebak dalam bentuk oligarkis dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kecenderungan selama ini menunjukkan pengambilan keputusan partai politik bersifat tertutup dan hanya ditentukan oleh sekelompok kecil elit partai. Keputusan tertinggi biasanya berada pada seseorang atau sekelompok kecil elit partai saja. Persoalan mekanisme internal dalam pembuatan keputusan dicirikan dengan

sentralisasi dalam pengambilan keputusan. Peran pengurus pusat masih dominan, dan terkadang berbeda dengan aspirasi daerah. Terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi partai (fungsi pendidikan politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi penyelesaian konflik). keluhan yang muncul adalah di mana partai politik belum melaksanakan fungsinya secara maksimal. Dalam konteks ini sumber masalah belum terlaksananya fungsi-fungsi partai politik tersebut adalah terkait dengan persoalan kelembagaan partai politik. Paling tidak, ada tiga masalah berkaitan dengan kelembagaan partai politik, yaitu: ideologi dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kaderisasi. Ideologi dan Platform

Setiap partai politik dibentuk berdasarkan diri pada ideologi yang hendak diusungnya. Ideologi ini yang kemudian menjadi identitas partai Untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari ideologi yang dianut oleh partai yang bersangkutan. Selain itu, ideologi juga merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai suatu partai politik. Ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu partai politik. Ia seharusnya melekat pada kehadiran suatu partai politik.

Ideologi, yang merupakan sistem nilai dan norma, tentu masih bersifat abstrak. Perlu ada penjabarannya lebih lanjut. Ideologi yang dianut oleh suatu partai politik perlu diterjemahkan ke dalam hal-hal yang riil dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara ini akan membantu masyarakat memahami dan mengerti tentang ideologi, yang bersifat abstrak itu, yang dianut oleh suatu partai politik. Keberadaan ideologi dalam sebuah partai juga menjadi pedoman nilai dalam melakukan program dan aktifitas kerja politik adalah hal yang penting. Ia menjadi pegangan bagi setiap kader dan pengurus partai dalam mengejawantahkan ideologi tersebut menjadi program, kegiatan atau aktifitas partai di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di samping itu, ideologi juga menjadi posisi politik (political stance) bagi setiap partai politik dalam mendiskusikan serta harus mampu memperdebatkan hal-hal yang menyangkut kehidupan ekonomi, sosial ataupun politik. Hal yang juga tak kalah penting, ideologi bagi partai dapat menjadi basis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya.

Dalam konteks kebijakan publik, ideologi juga berperan dalam menentukan posisi apa yang harus ditentukan bagi partai untuk mendorong atau bahkan menolak suatu kebijakan. Sementara itu dalam konteks hubungan dengan para pemilih, ideologi juga dapat menjadi daya tarik bagi pemilih untuk menentukan partai mana yang sesuai dengan cara pandang yang mereka yakini. Dalam konteks ini, peran ideologi ini diyakini menjadi panduan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya di kotak suara yang kemudian dikenal dengan istilah ideology identification.

Cara untuk menterjemahkan ideologi yang dimiliki oleh suatu partai politik ke dalam hal-hal yang riil dan konkret dirumuskan dalam bentuk Platform partai politik. Platform partai berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Platform partai memuat hal-hal penting dan mendasar yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penyusunan hal-hal yang harus dilakukan, seperti program kerja dan isu politik. Platform partai merupakan cetak biru, di mana sistem nilai dan norma (ideologi) diterjemahkan dan menjadi landasan bagi penyusunan hal-hal yang bersifat lebih konkret (Firmansyah: 2008).

Platform partai dipandang penting untuk dua sasaran. Pertama, sebagai instrumen komunikasi kepada massa konstituen tentang apa yang diperjuangkan partai. Selain mencerminkan identitas partai, platform juga menjadi panduan arah partai ketika mempunyai akses terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, platform dapat dilihat sebagai proposal yang ditawarkan partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih. Kedua,

platform adalah cara pandang partai tentang bagaimana seharusnya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang dikelola. Platform adalah turunan dari ideologi partai, yang memuat nilai, harapan, dan benchmark normatif partai. Dengan demikian, bagi anggota partai, platform merupakan acuan sikap dan tindakan dalam kehidupan politik mereka sehari-hari.

Bagaimana tentang ideologi dan platform partai-partai politik di Indonesia. Bila merujuk pada asas partai yang dimiliki oleh masing-masing partai politik, secara garis besar partai-partai politik berdasarkan pada tiga ideologi, yaitu Islam, Nasionalisme, dan Sosialisme Demokrat. Dari ketiga ideologi tersebut, sebagian besar partai-partai politik yang ada mendasarkan diri pada ideologi Islam dan Nasionalisme (Pancasila).

Ideologi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik tersebut belum dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam bentuk yang riil dan konkret. Umumnya partai-partai politik yang ada masih berpaku pada ideologi mereka anut yang masih abstrak tersebut, dan ideologi yang mereka miliki belum sampai diturunkan dalam wujud konkret dalam bentuk cetak biru (platform) berupa program dan kebijakan-kebijakan yang riil. Bila pun ada program dan kebijakan yang mereka rumuskan, hal itu masih tetap bersifat umum. Karena ideologi partai belum dijabarkan dalam bentuk pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkan, maka perbedaan di antara partai politik itu baru tampak secara simbolis. Untuk meningkatkan pelebagaan partai politik dari segi identitas nilai partai perlu dirumuskan platform partai yang dikomunikasikan secara terus-menerus (Surbakti: 2003).

Islam sebagai ideologi yang dimiliki oleh partai-partai Islam, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan antara partai Islam yang satu dengan partai Islam yang lainnya. Demikian juga nilai-nilai agama –terutama konsep amar ma'ruf nahi munkar dan rahmatan lil alamin, yang diambil dari ajaran Islam yang dianut oleh PAN maupun PKB, pada dasarnya tidak berbeda dengan kedua partai Islam di atas. Perbedaannya hanya terletak pada peletakan asas Pancasila, nasionalisme, pluralisme dan terbuka pada PAN dan PKB, misalnya.

Pada sisi yang berseberangan, PDIP dan Partai Demokrat pada dasarnya lahir dari ideologi yang sama, nasionalisme. Namun demikian, dalam menerjemahkan nasionalisme sebagai ideologi, Partai Demokrat dan PDIP mempunyai pandangan yang berbeda. Semangat nasionalisme menurut Partai Demokrat diinterpretasikan sebagai tidak membedakan ras, suku, bangsa, jenis kelamin, profesi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, PDIP berpendirian bahwa nasionalisme berkaitan dengan wawasan kebangsaan, sebagai cetusan rasa memiliki bangsa dan negara yang harus dipelihara kelanggengannya.

Pada sisi yang berseberangan, PDIP dan Partai Demokrat pada dasarnya lahir dari ideologi yang sama, nasionalisme. Namun demikian, dalam menerjemahkan nasionalisme sebagai ideologi, Partai Demokrat dan PDIP mempunyai pandangan yang berbeda. Semangat nasionalisme menurut Partai Demokrat diinterpretasikan sebagai tidak membedakan ras, suku, bangsa, jenis kelamin, profesi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, PDIP berpendirian bahwa nasionalisme berkaitan dengan wawasan kebangsaan, sebagai cetusan rasa memiliki bangsa dan negara yang harus dipelihara kelanggengannya.

Persoalan yang muncul, ideologi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik tersebut belum dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam bentuk yang riil dan konkret. Umumnya partai-partai politik yang ada masih berpaku pada ideologi mereka anut yang masih abstrak tersebut, dan ideologi yang mereka miliki belum sampai diturunkan dalam wujud konkret dalam bentuk cetak biru (platform) berupa program dan kebijakan-kebijakan yang riil. Bila pun ada program dan kebijakan yang mereka rumuskan, namun

masih tetap bersifat umum.

Platform partai dipandang penting untuk dua sasaran. Pertama, sebagai instrumen komunikasi kepada massa konstituen tentang apa yang diperjuangkan partai. Selain mencerminkan identitas partai, platform juga menjadi panduan arah partai ketika mempunyai akses terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, platform dapat dilihat sebagai proposal yang ditawarkan partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih. Kedua, platform adalah cara pandang partai tentang bagaimana seharusnya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang dikelola. Platform adalah turunan dari ideologi partai, yang memuat nilai, harapan, dan benchmark normatif partai. Dengan demikian, bagi anggota partai, platform merupakan acuan sikap dan tindakan dalam kehidupan politik mereka sehari-hari.

Karena belum diterjemahkan secara riil, tidak heran bila sulit ditemukan perbedaan antara partai politik yang satu dengan yang lainnya. Padahal titik utama untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lainnya terletak pada, seperti dikemukakan di atas, ideologi dan platform partai politik. Karena ideologi dan platform ini yang menjadi ciri dan identitas suatu partai politik, yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Partai-partai lain yang mengklaim diri lahir dari atau dilahirkan oleh kalangan nasionalis juga tidak mampu menunjukkan diferensiasi yang nyata. Munculnya banyak partai dari basis ideologi yang sama lebih didorong oleh ketidakmampuan untuk mampu mengkompromikan perbedaan pandangan atau kepentingan di dalam “keluarga besar” masing-masing, khususnya dalam soal pemilihan pimpinan partai. Kesulitan yang sama juga ditemukan ketika publik membandingkan kebijakan atau sikap partai-partai terhadap isu yang berkembang dalam kehidupan bernegara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata di antara mereka.

Rekrutmen dan Kaderisasi

Dalam setiap organisasi, anggota merupakan sumber dukungan utama. Dalam organisasi partai politik, peran anggota signifikan karena melalui para anggota ini akan berperang sebagai juru bicara untuk menyuarakan dan menyebarluaskan platform dan program partai kepada masyarakat. Selain itu, anggota merupakan sumber kaderisasi yang dapat melahirkan calon-calon pemimpin partai politik. Untuk mengisi keanggotaan tersebut, partai politik melakukan rekrutmen anggota. Partai politik yang baik tentu memiliki sistem rekrutmen yang baik. Sistem rekrutmen itu mencakup pola seleksi, penjenjangan, dan pendidikan bagi para anggotanya. Dengan demikian, tidak akan sembarangan seseorang secara otomatis dapat memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi terlebih dahulu (Ipcos: 2001).

Selain rekrutmen anggota, partai politik yang melembaga dengan baik akan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi anggota- anggotanya secara terus menerus. Tujuan dari kaderisasi dan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka (para anggota) mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa, dan Negara (Philip: 2003).

Kaderisasi dan pendidikan politik dilakukan oleh partai politik dalam rangka untuk mencetak pemimpin. Oleh karena itu, partai politik yang terlembaga akan melakukan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan secara reguler. Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenjang dan ruang lingkup masing-masing tingkatan kepengurusan. Melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini, diharapkan nanti akan lahir kader pemimpin partai yang berkualitas.

Persoalan yang muncul umumnya pada partai-partai politik saat ini adalah kurang melembaganya proses rekrutmen anggota. Pola seleksi, penjenjangan, dan pendidikan bagi

para anggota kurang dilakukan secara lebih memadai. Memang ada beberapa partai politik sudah melakukan seperti itu, namun sebagian partai politik yang lain belum melakukan secara melembaga. Fenomena munculnya “kader instan”, ketidaksiapan parpol dalam mengajukan calon anggota legislatif atau eksekutif, semua itu menunjukkan bahwa partai politik belum melakukan pola rekrutmen secara sistematis dan ajeg (Tempo).

Sementara itu dalam sistem keanggotaan, memang semua partai sudah menggunakan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi mereka yang telah menjadi anggota partai. Namun persoalannya adalah umumnya partai-partai politik belum memiliki data yang pasti dan akurat tentang jumlah anggota yang terdaftar di masing-masing partai yang ada. Yang ada baru berupa klaim yang dikemukakan oleh masing-masing partai politik. Selama ini yang terdata dengan baik baru sebatas jumlah pengurus partai.

Serupa dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik yang masih mengidap masalah, dalam soal kaderisasi dan pendidikan politik juga demikian. Partai-partai politik saat ini, dalam hal kaderisasi dan pendidikan politik masih lemah. Memang harus diakui, ada beberapa partai politik sudah melakukan proses kaderisasi secara berjenjang. Namun demikian, proses kaderisasi masih terbatas pada pemahaman kader tentang visi-misi partai politik yang bersangkutan, belum sampai pada promosi hasil kaderisasi dan pendidikan politik itu untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Untuk mengisi jabatan-jabatan publik tersebut, umumnya partai-partai politik mengambil dari luar kader atau anggota partai yang bersangkutan.

Fenomena kader partai “loncat pagar” dari partai yang satu ke partai politik yang lainnya menunjukkan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik belum berhasil menanamkan loyalitas yang kuat. Bisa jadi sistem nilai dan norma (ideologi) suatu partai belum berhasil terinternalisasi ke dalam diri para kader. Akhirnya, kader dengan mudah “loncat pagar” ke partai lainnya.

Problem Sistem Kepartaian

Kajian teoritis tentang sistem kepartaian mengacu pada aspek tipologi numerik (numerical typology), yaitu sejumlah partai yang dianutnya. Studi klasik yang dilakukan oleh Duverger, misalnya, memperlihatkan hal tersebut (jumlah partai) yang membagi sistem kepartaian atas sistem partai tunggal, dwi partai, dan multi partai. Begitu juga studi-studi yang dilakukan oleh Blondel dan Rokkan, melihat sistem kepartaian dilihat dari segi jumlah. Namun berbeda dengan Duverger, Blondel dan Rokkan menambahkannya dengan melihat segi kompetisi di antara partai-partai yang ada sehingga melahirkan sistem partai dominan dan tidak dominan.

Sementara itu, Sartori melihat sistem kepartaian selain berdasarkan jumlah dan kompetisi juga berdasarkan jarak ideologi di antara partai-partai yang ada. Ia menggolongkan sistem kepartaian didasarkan atas jumlah kutub (polar), jarak di antara kutub-kutub itu (polaritas), dan arah perilaku politiknya. Berdasarkan itu, ia lalu mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu pluralisme sederhana, pluralisme moderat, dan pluralisme ekstrim.

Sama dengan Sartori, Sairoff juga menjelaskan sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi, sehingga menghasilkan sistem dua partai, dua setengah partai, multi partai moderat dan multi partai ekstrem. Dalam sistem multi partai moderat terbagi atas: satu partai dominan, dua partai utama, dan keseimbangan antar partai. Begitu juga dengan multi partai ekstrem, yang terbagi atas: satu partai dominan, dua partai utama, dan keseimbangan antar partai.

Berbeda dengan hal di atas, Huntington mengkaji sistem kepartaian dari sudut institusionalisasi (pelembagaan). Sistem kepartaian yang kokoh, demikian Huntington, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi

politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik.¹² Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi- organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru kedalam sistem politik.

Senada dengan Huntington, Mainwaring juga melihat sistem kepartaian dari sudut institusionalisasi. Meski berangkat dari konsep yang sama dengan Huntington, ia mengelompokkan sistem kepartaian melihatnya berdasarkan (1) Stabilitas dalam persaingan kepartaian; (2) Mengakarnya parpol dalam masyarakat; (3) Legitimasi atas partai dan pemilu sebagai mekanisme yang sah; dan (4) Struktur organisasi partai yang stabil (Mainwaring: 2000).

Herbert Kitschelt mengusulkan klasifikasi partai-partai politik dalam kerangka membahas isu sistem kepartaian berdasarkan atas tiga tipe ideal, yaitu partai-partai programatik, karismatik, dan klientilistik. Partai programatik adalah partai yang mendasarkan pekerjaannya pada program partai secara khusus. Partai karismatik ditentukan oleh kepemimpinan seseorang yang karismatik. Dan partai klientilistik adalah partai yang bekerja lebih condong pada kepentingan pribadi, keuntungan partisan, dan jasa untuk klien setia mereka.

Sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah mempraktekan sistem kepartaian berdasarkan sistem multipartai, meski dalam derajat dan kualitas yang berbeda. Pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) menerapkan sistem multipartai dengan tingkat kompetisi yang tinggi, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), meski mempraktekan sistem multipartai, tetapi tidak ada kompetisi dan hanya sekedar jumlah saja karena partai- partai politik yang ada tidak memiliki peran apa-apa. Begitu juga masa Orde Baru dengan jumlah yang hanya tiga partai, masih disebut sebagai sistem multipartai juga. Namun sistem multipartai yang ada pada masa Orde Baru sama dengan masa Demokrasi Terpimpin. Bedanya, pada masa Orde Baru terdapat partai politik dominan, yakni Golkar, tetapi terus menerus berkuasa sehingga terbentuk sistem kepartaian hegemonic.

Pada masa reformasi juga menerapkan sistem multipartai. Tetapi, sistem multipartai yang berjalan sangat ekstrim (hyper multyparties) karena begitu banyaknya jumlah partai politik yang ada. Sistem multipartai yang berjalan saat ini, sama dengan masa Demokrasi Parlementer, mengalami polarisasi dan fragmentasi yang pada gilirannya mempersulit proses pengambilan keputusan di legislatif. Beberapa contoh dan kasus yang dipertontonkan oleh DPR dalam penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan lain-lain baru-baru ini cukup sebagai bukti menunjukkan adanya negosiasi- negosiasi dimaksud.

Persoalannya bagaimana cara untuk menciptakan sistem multipartai sederhana tersebut. Tentu saja dalam proses penyederhanaan partai tersebut harus berjalan secara alami, tidak seperti yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Sebenarnya dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu mencoba untuk menyederhanakan jumlah partai dengan menerapkan syarat yang ketat untuk pendirian atau pembentukan partai politik dan memberlakukan ambang batas (electoral treshold) untuk dapat ikut pemilu berikutnya.

Cara lain untuk menyederhanakan partai politik adalah dengan cara menerapkan sistem pemilu distrik. Seperti diyakini oleh Duverger bahwa sistem distrik lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik dan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa diadakan paksaan. Sementara dalam sistem proposional cenderung mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai politik baru. Sistem ini

dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.

Memang kelebihan sistem distrik dapat menyederhanakan jumlah partai karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik (daerah pemilihan) hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama. Dengan berkurangnya partai, pada gilirannya akan meningkatkan kerjasama antara partai-partai dan mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan mempertingkat stabilitas nasional. Selain itu juga, sistem distrik dapat meningkatkan kualitas keterwakilan karena wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik sehingga hubungannya dengan terwakil lebih erat, dan dengan demikian ia akan mendorong untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Meskipun sistem distrik diakui dapat menyederhanakan jumlah partai politik, namun pilihan bagi Indonesia untuk saat ini belum bisa menerapkan sistem ini. Hal ini karena, sebagaimana diketahui, bahwa bangsa Indonesia sangat heterogen. Kondisi seperti itu bila menerapkan sistem distrik maka golongan-golongan yang ada, terutama golongan-golongan minoritas, kurang terakomodir.

Oleh karena itu, saya kira pilihan untuk tetap menerapkan sistem pemilu proporsional merupakan suatu pilihan yang tepat. Kondisi masyarakat Indonesia yang plural tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu penerapan sistem proporsional merupakan wujud penghormatan dan pengakuan atas pluralitas masyarakat Indonesia. Kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat Indonesia, termasuk kelompok minoritas, harus diakui eksistensinya.

Persoalannya, bagaimana dengan tetap menerapkan sistem proporsional jumlah partai politik secara alami dapat berkurang. Beberapa negara, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini, mencoba menerapkannya dengan memberlakukan electoral threshold. Di antara negara-negara yang besar menerapkan electoral threshold adalah Swedia dan Jerman, masing-masing 4 % dan 5 %. Khusus untuk Jerman, bagi partai politik yang tidak sampai memenuhi electoral threshold sebanyak 5 % maka wakil-wakilnya yang terpilih tidak bisa duduk dalam parlemen.

Dengan menerapkan PT maka partai-partai politik yang tidak memenuhi batas ambang yang ditetapkan dalam PT tersebut tidak bisa memperoleh kursi di DPR. Dengan memberlakukan PT ini pada gilirannya nanti jumlah partai-partai politik di DPR yang efektif relatif sedikit.

KESIMPULAN

Dalam era reformasi ini, partai politik menjadi salah satu institusi yang penting. Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. Meski berbagai reaksi yang beragam terhadap eksistensi partai politik kekinian, semua pihak sepakat bahwa demokrasi akan semakin baik bila partai politik profesional dan akuntabel. Tantangan inilah yang menjadi pekerjaan berat yang harus disikapi bersama oleh semua komponen bangsa di mana kehadiran partai politik yang profesional, demokratis dan akuntabel menjadi kebutuhan saat ini.

Salah satu instrumen penting dalam demokrasi perwakilan adalah partai politik. Partai merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Tanpa ada partai politik maka demokrasi tidak akan bisa bekerja dan berjalan. Paling tidak ada tiga alasan mengapa partai politik perlu agar demokrasi berfungsi. Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik; kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan; dan ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.

Keberadaan partai politik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi. Partai merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan karena memang keberadaan partai politik untuk maksud tersebut. Dalam konteks itu, parpol harus melaksanakan sejumlah fungsi. Di antara fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik, yaitu fungsi : sebagai mediasi antara pemerintah dan rakyat; pencalonan kandidat; selanjutnya mengorganisasi pemerintahan; kemudian mendorong akuntabilitas publik; hinggapendidikan politik; dan pengatur konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Party System”, American Joernal of Political Science, Vol. 35, No. 1 February, 1991.
- Diamond and Marc F Plattner, The
- Firmanzah, Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Geertz, Clifford, Islam, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981
- Global Divergence of Democracies, Baltimore and London; The Johns Hopkins University Press, 2000.
- Haris, Syamsuddin, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Jakarta; Yayasan Obor, 1999.
- Hatta, Moh. Demokrasi Kita, Jakarta: Jambatan, 1966.
- Huntington, Samuel P, Political Order in Changing Societies, New Haven: Yel University Press, 1968.
- IPCOS, Partai dan Kita, Jakarta, 2001 Kaisiepo, Manuel. “Partai Baru atau Jakarta: P2P LIPI, 2004.
- Kepartaian”, Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP Unair, 8 Desember 2007.
- Lijphart, Arend (ed.), Sistem Pemerintahan Parleментар dan Presidensial, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lijphart, Arend, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Counrien, New Haven and London, Yel University, 1999.
- Mainwaring, Scott, “Party System in The Third Wave”, dalam Larry Diamond and Marc F Plattner, The Global Divergence of Democracies, Baltimore and London; The Johns Hopkins University Press, 2000.
- Mainwaring, Scott, Party System in The Third Wave”, dalam Larry
- Mair, Peter, “Party Sistem and
- Marijan, Kacung, “Demokrasi dan Stabilitas pemerintahan: Perbandingan Sistem Pemerintahan, Sistem Pemilu, dan Sistem
- McAllister, Ian, “Party Adaptation and Factionalism in within the
- Muzani, Saiful, “Plus-Minus
- Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis, Jakarta, 2006.
- Oaks- New Delhi: Sage Publications, 2002).
- Penyederhanaan Partai”, Majalah Tempo, Edisi 9-15 Juli 2007
- Randal, Vicky and Lars Svasand. “Party Institutionalization in New Democracies”, dalam Party Politics Vol. 8 No. 1. (London-Thousand
- Romli, Lili (ed.), Evaluasi Pemilu 2004: Analisis Proses dan Hasil Pemilu Legislatif,
- Romli, Lili, dkk, Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia, Jakarta: Puskapol FISIF UI dan Patnership, 2008.
- Romli, Lili, Islam Yes, Partai Islam Yes, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Romli, Lili “Mencari Format Sistem Kepartaian di Indonesia”, Jurnal Politika, Vol. 2 Tahun 2006.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Rajawalipers.
- Sistem Kepartaian Baru, Kompas, 20 September 1994.
- Structures of Competition”, dalam Lawrence Leduc, Richard G. Niemi, and Pippa Norris (eds.), Comparing Democracies: Election and Voting in Global Perpective, California: Sage Publication, Inc., 1996.